

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Bagian Timur

Oleh:

Rosita Septi Safitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan

*Corresponding Author: rosita2000010038@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT: Trade openness is a measure of the extent to which a region participates in international trade, which is influenced by various factors and impacts the region's economy. Too much trade openness increases the risk of harming domestic industries and creates dependence on the export and import sectors. Trade openness is measured by the ratio of total exports and imports to Gross Regional Domestic Product (GRDP), while the Gini Index measures inequality. This study aims to analyse the effect of trade openness on inequality at the province level in Indonesia, namely Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua. In this study, the data used is panel data from 17 provinces in Indonesia during the period 2015-2022. The model used is the Seemingly Unrelated Regression (SUR) panel model. The results show that trade openness has a significant negative effect on inequality among provinces in Indonesia. Foreign direct investment (FDI) has a significant negative effect on income inequality among provinces in Indonesia. Open unemployment rate has a significant negative effect on income inequality among provinces in Indonesia. Poverty has a significant positive effect on income inequality among provinces in Indonesia. Provinces with higher trade openness tend to have greater income inequality.

Keywords: trade openness, FDI, income inequality, unemployment, poverty

ABSTRAK: Keterbukaan perdagangan adalah ukuran sejauh mana suatu wilayah berpartisipasi dalam perdagangan internasional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdampak pada perekonomian wilayah tersebut. Keterbukaan perdagangan yang terlalu tinggi meningkatkan risiko merugikan industri dalam negeri dan menciptakan ketergantungan pada sektor ekspor dan impor. Keterbukaan perdagangan diukur dengan rasio total ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan Indeks Gini mengukur ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan tingkat provinsi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data panel dari 17 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2022. Model yang digunakan adalah model panel Seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Provinsi

dengan keterbukaan perdagangan yang lebih tinggi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih besar.

Kata Kunci keterbukaan perdagangan, PMA, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan

2620-8849 © 202X The Author(s). Published by ISEI Purwokerto and Department of Economics and Development Studies Universitas Jenderal Soedirman. This is an open access article under the [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

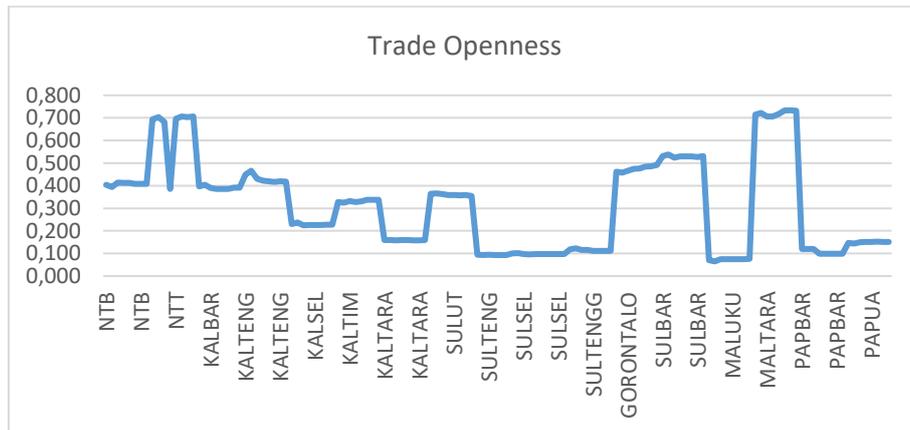
LATAR BELAKANG

Kesenjangan atau ketimpangan merupakan disparitas pendapatan antara golongan berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah (Todaro & Smith, 2003). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio Gini pendapatan antar rumah tangga di Indonesia meningkat dari 0,399 pada 2015 menjadi 0,414 pada 2022. Secara spasial, Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia. Peningkatan ketimpangan ini terjadi bersamaan dengan makin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perdagangan global. Peningkatan ketimpangan terjadi bersamaan dengan ekspansi nilai perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama. Pangsa nilai ekspor-impor terhadap PDB Indonesia meningkat dari 34,7% pada 2015 menjadi 56,8% pada 2021. Banyak negara sedang berkembang yang laju pertumbuhan tinggi tetapi pada kenyataannya tidak berdampak besar dan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia (Kuncoro & Mudrajad, 1997) Ketimpangan pendapatan antar provinsi ditunjukkan oleh perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi. Beberapa provinsi memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang jauh lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah belum tentu memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah, karena adanya penguasaan sumber daya oleh elit lokal. Ketimpangan pendapatan antarprovinsi tercermin dari rasio gaji terendah dan tertinggi pekerja formal di setiap provinsi. Di beberapa provinsi, rasio ini cukup tinggi. Koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan menunjukkan variasi antar provinsi. Provinsi dengan industrialisasi dan pusat perdagangan yang maju cenderung memiliki Indeks Gini yang lebih tinggi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tidak diiringi dengan penyediaan lapangan pekerjaan memicu terjadinya urbanisasi kumuh di beberapa provinsi. Penelitian ini hanya berfokus pada Kawasan Indonesia Bagian Timur yang terdiri dari 17 provinsi dengan karakteristik dan tantangan tersendiri dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan peran keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, pendekatan dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dan mengatasi masalah ketimpangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur.



Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Gini 17 Provinsi 2015-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik di atas, Gini Index dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan parameter dari ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun ada beberapa juga yang mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi di provinsi ini, adalah salah satu permasalahan dan isu yang bisa menghambat pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ekonomi tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial. Ketimpangan antar provinsi ini dapat berpotensi memicu kecemburuan sosial, konflik, bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika disparitasnya terlalu tinggi.



Gambar 1.2

Perkembangan Keterbukaan Perdagangan 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, perkembangan keterbukaan perdagangan dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun ada beberapa juga yang mengalami penurunan.

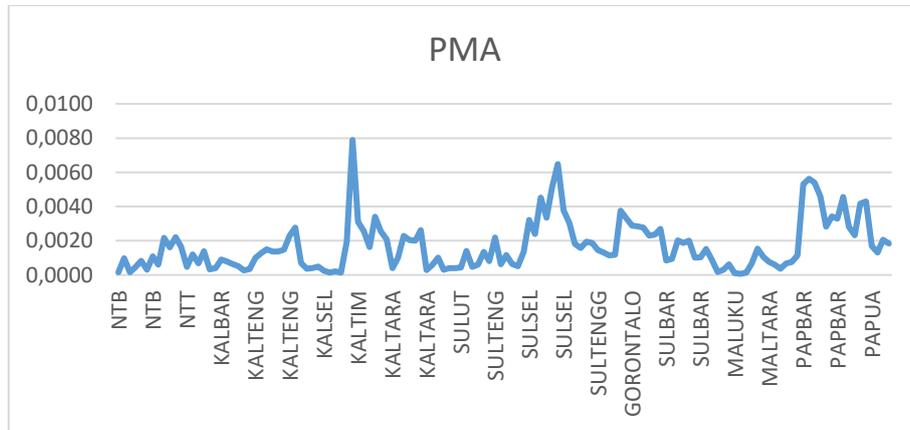
Menurut (Dorn et al., 2022) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan. Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar provinsi. Menurut (Kurniawan & A'yun, 2022) liberalisasi perdagangan membawa arah baru untuk mempromosikan kegiatan ekspor secara besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan perdagangan akan mendorong perkembangan sektor manufaktur. Selama satu dekade terakhir, studi tentang perdagangan internasional telah menarik perhatian para ekonom lokal dan internasional. Bagi negara berkembang, perdagangan internasional berperan penting sebagai representasi dari kemampuan produksi produsen dalam negeri (Subanti et al., 2019).

a. Hubungan Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Stopler-Samuelson memberikan penjelasan mengenai dampak peningkatan keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika suatu negara dengan tenaga kerja berketerampilan rendah yang melimpah (negara berkembang) meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, maka akan terjadi penurunan upah tenaga kerja berketerampilan tinggi. Upah untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi dan peningkatan upah untuk tenaga kerja berketerampilan rendah, sehingga akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Keterbukaan perdagangan akan mengurangi ketimpangan regional dengan mengalihkan kegiatan industri dari pusat kota ke daerah pinggiran. Menurut (Kuntoro & Widyastutik, 2020) bila pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, keseimbangan upah tenaga kerja berketerampilan tinggi turun dan untuk tenaga kerja berketerampilan rendah akan naik. Dari pergeseran upah antara pekerja berpendapatan rendah dan tinggi ini Stopler-Samuelson memberikan penjelasan tentang dampak peningkatan keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila negara yang mempunyai kelimpahan tenaga kerja berketerampilan rendah (negara berkembang) meningkatkan keterbukaan perdagangan misalnya dengan menurunkan tarif, akan terjadi penurunan upah pada tenaga kerja berketerampilan

tinggi dan kenaikan upah pada pekerja berketerampilan rendah sehingga akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Salim dalam (Fatsabit & Yusran, 2019) tujuan adanya transfer modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pemilik modal.



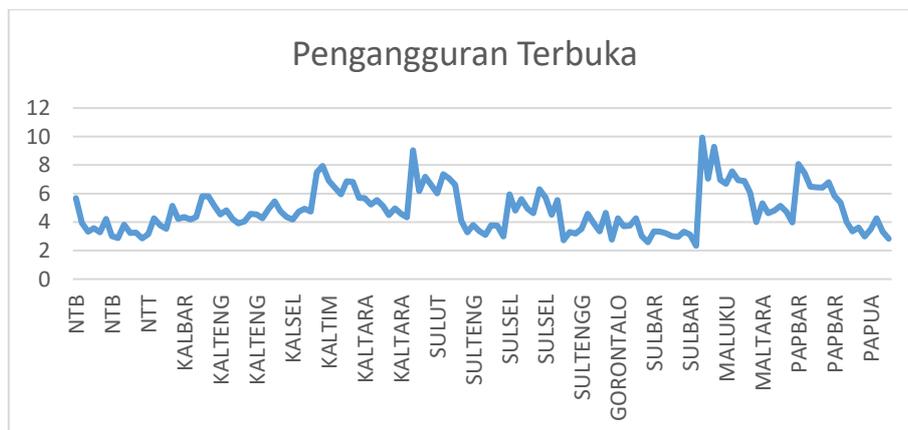
Gambar 1. 3
Perkembangan PMA 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik di atas, perkembangan PMA dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun ada beberapa juga yang mengalami penurunan.

b. Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan

Investasi menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan karena meningkatkan upah pekerja tidak terampil sekaligus mengurangi tingkat aktivitas mereka, sehingga penurunan ketimpangan pendapatan bertepatan dengan peningkatan PMA di negara-negara berkembang. Menurut teori ekonomi neoklasik, PMA dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara tuan rumah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa PMA akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan mendorong transfer teknologi serta keterampilan. Dengan demikian, PMA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekerja dan mempersempit kesenjangan pendapatan (Lipsey et al., 1992).



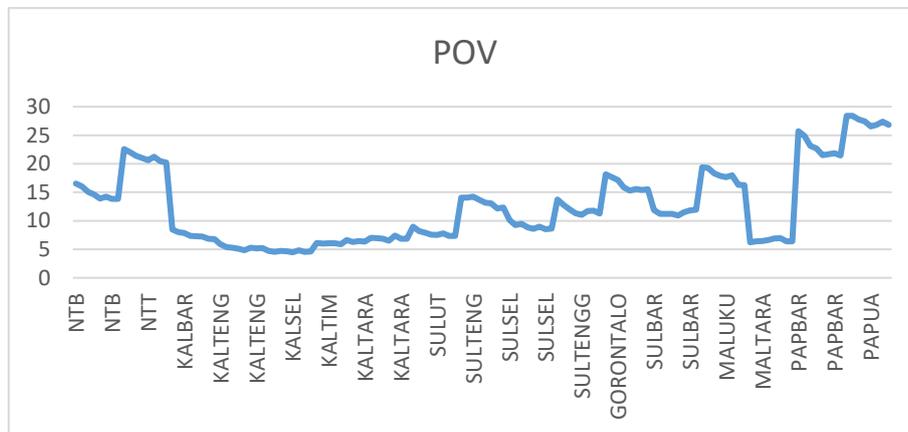
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 1
Perkembangan PT 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Dari gambar di atas, perkembangan pengangguran terbuka dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

c. Hubungan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut Bank Dunia (2016), sebagian besar angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Situasi ini menciptakan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata, tetapi distribusi yang tidak merata ini terkonsentrasi di lapisan ekonomi yang lebih rendah. Dengan adanya hal tersebut, dari sisi pemerataan ekonomi di masyarakat, pengangguran yang tinggi berdampak pada penurunan kesenjangan ekonomi, namun dari sisi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan Indonesia. (Ukper & Slabbert, 2009) menyimpulkan bahwa pengangguran meningkatkan ketidakmerataan di masyarakat. (Pi & Zhang, 2018) menemukan pengangguran perkotaan dengan tenaga kerja terampil dapat memperlebar ketimpangan upah ketika perbandingan modal tenaga kerja di sektor tersebut melebihi satu. Juga menemukan adanya memiliki pengaruh positive tingkat pengangguran terhadap ketidakmerataan pendapatan (Efriza, 2014).



Gambar 1. 2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dari gambar di atas, perkembangan kemiskinan dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa kemiskinan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

d. Hubungan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut (Kunenengan et al., 2023) kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin di pedalaman dikarenakan ketertinggalan dari berbagai aspek seperti, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk mendapat pengobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

Ketidakmerataan penghasilan memiliki keterkaitan kuat dengan kemiskinan. Kondisi kemiskinan menimbulkan disparitas persebaran penghasilan antara Si Kaya dan Si Miskin terus meluas. Menurut (Arsyad & Azhar, 2017), kegagalan dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan mengakibatkan peningkatan ketimpangan persebaran pendapatan pada negara berkembang. Karenanya, pengurangan tingkat kemiskinan dibutuhkan supaya ketidakmerataan pendapatan di masyarakat dapat berkurang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah pendekatan yang digunakan untuk melihat *value* variabel bebas, baik satu maupun lebih variabel

independen tanpa adanya komparasi atau korelasi dengan variabel dependen (Sugiyono, 1999). Data yang digunakan dalam metode pendekatan berupa numerik atau angka yang didapatkan dari proses olah analisis statistik serta memiliki tujuan analitis. Menurut (Ramadhona et al., 2022) Uji analisis regresi data panel akan dilakukan dengan memilih model terbaik yang terdiri dari estimasi model, uji kecocokan model, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Lokasi dalam penelitian dilakukan pada Kawasan Indonesia di Indonesia yang berjumlah 17 provinsi yang terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional* merupakan pengumpulan data berupa data time series pada periode 2015-2022.

Tabel 1.1
Definisi Operasional

Variabel	Simbol	Pengertian	Satuan	Sumber data	Detail Data
Gini Index	GI	Ukuran ketimpangan pendapatan atau kekayaan diantara penduduk suatu wilayah	Poin	Badan Pusat Statistik	-
Keterbukaan Perdagangan	TO	Rasio antara total ekspor dan impor yang kemudian dibagi dengan PDRB	Persen	Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik	Rasio antara total ekpsor dan impor dengan PDRB
Penanaman Modal Asing	PMA	Persentase yang didapatkan dari rasio antara PMA yang kemudian dibagi dengan PDRB	Persen	Badan Pusat Statistik	Rasio antara PMA dengan PDRB
Pengangguran Terbuka	PT	Presentase pengangguran terbuka dimana dikarenakan kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan pencari kerja	Persen	Badan Pusat Statistik	-

Tingkat kemiskinan	POV	Ukuran persentase penduduk di suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	Badan Pusat Statistik	Tingkat kemiskinan (PO)
---------------------------	-----	--	--------	-----------------------	-------------------------

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 TO_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 PT_{it} + \beta_4 POV_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

GINI = Indeks Gini (poin)

TO = Trade Openness (persen)

PMA = Penanaman Modal Asing (persen)

PT = Pengangguran Terbuka (persen)

POV = Tingkat Kemiskinan (persen)

Penelitian ini menggunakan data panel karena terdapat beberapa keuntungan menggunakan data panel, diantaranya mengurangi bias pada data cross section murni, dan juga dengan menggunakan data panel memungkinkan untuk menguji model yang lebih kompleks. Interaksi setiap variabel juga dapat diamati dari waktu ke waktu. Keuntungan lainnya adalah data panel memberikan lebih banyak degree of freedom, sehingga menghasilkan estimator yang lebih efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bank Dunia (2015), mengurangi ketimpangan merupakan langkah yang harus diprioritaskan oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan ketimpangan memiliki dampak jangka panjang dan dapat menimbulkan dampak sosial berupa konflik yang dapat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam panel terdapat empat model data yaitu *Coomon Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM) dan *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Dari keempat model tersebut, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Hasil dari SUR adalah keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan perdagangan, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan antar provinsi.

Tabel 1. 2

Hasil Summary Data Panel

Variabel	Obs	Mean	Std.Deviasi	Min	Max
Ketimpangan pendapatan	136	0,353	0,036	0,27	0,429
Keterbukaan perdagangan	136	0,030	0,0227	0,0023	0,105
Penanaman Modal Asing	136	0,0047	0,009	0,00006	0,063
Pengangguran Terbuka	136	4,818	1,534	2,34	9,93
Kemiskinan	136	12.41213	6,649	4,47	28,4

Sumber: hasil olah data stata 14, disusun kembali

Tabel 1.2 merupakan analisis deskriptif dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian

berdasar pada deskriptif variabel.

Dari 136 observasi terlihat bahwa ketimpangan pendapatan memiliki nilai mean sebesar 0,355 dengan nilai standar deviasi 0,036%. Nilai ketimpangan paling rendah diantara 17 provinsi di Indonesia adalah Provinsi Maluku Utara dengan nilai 0,2 pada tahun 2021, sedangkan ketimpangan paling tinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,429 pada tahun 2017.

Variabel keterbukaan perdagangan dengan jumlah 136 observasi dengan nilai mean 0,030 dan nilai standar deviasi sebesar 0,022%. Nilai keterbukaan perdagangan paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 dengan nilai 0,00233 dan nilai ketimpangan pendapatan yang paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 dengan nilai 0,1055.

Variabel PMA dengan jumlah 136 observasi memiliki nilai rata-rata 0,0047 dan nilai standar deviasi 0,0090%. Nilai PMA paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 dan penanaman modal asing yang paling tinggi adalah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022.

Variabel pengangguran terbuka dengan 136 observasi memiliki nilai mean sebesar 4,818 dengan nilai standar deviasi 1,534%. Nilai pengangguran terbuka paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 dan nilai pengangguran terbuka paling tinggi adalah Provinsi Maluku pada tahun 2015.

Variabel kemiskinan dengan jumlah 136 observasi memiliki nilai rata-rata 12,412 dengan nilai standar deviasi 6,649%. Nilai kemiskinan paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 dan nilai kemiskinan paling tinggi adalah Provinsi Papua pada tahun 2015.

Tabel 1.3
Hasil Uji Data Panel

Variabel	CEM	FEM	REM	SUR
Keterbukaan Perdagangan	-0,084 (0,526)	-01643 (0,431)	-0,0736 (0,680)	-0,8473 (0,074)***
Penanaman Modal Asing	-1,0027 (0,001)***	0,4186 (0,031)**	0,4081 (0,030)**	-1,0027 (0,000)***
Pengangguran Terbuka	-0.0025 (0,109)	-0,0019 (0,304)	-0,0008 (0,585)	-0,0028 (0,002)***
Kemiskinan	0,0025 (0,000)***	0,0062 (0,000)***	0,0037 (0,000)**	0,3437 (0,000)***

Sumber: hasil olah data stata 14, disusun kembali

Ket: ***=1% (0,01); **=5% (0,05); *=10% (0,10)

Dari uji *Common Effect Model*, penanaman modal asing dan kemiskinan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena nilai probabilitas kurang dari 5%. Namun keterbukaan perdagangan dan pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan ini karena keduanya memiliki nilai probabilitas lebih dari 5%.

Sedangkan dari uji *Fixed Effect Model* yang berpengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan adalah PMA dan kemiskinan dengan nilai probabilitas 5%, dan yang tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan ialah keterbukaan perdagangan dan tingkat pengangguran terbuka.

Untuk hasil dari uji *Random Effect Model* yang memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah PMA dan kemiskinan dengan nilai probabilitas 5%, dan yang tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan ialah keterbukaan perdagangan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1.4
Hasil Uji SUR

Variabel	Coefisien	Std.Error	Z	p> z
Keterbukaan perdagangan	-0,8473	0,0474	-1,78	0,074***
Penanaman modal asing	-1,0027	0,2286	-4,38	0,000***
Pengangguran terbuka	-0,0028	0,0009	-3,04	0,000***
Kemiskinan	0,0025	0,0001	14,61	0,000***

Cons	0,3437	0,0058	58,61	0,000***
------	--------	--------	-------	----------

Sumber: hasil olah data stata 14, disusun kembali

Ket : ***= 10%

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dinamis dengan metode Seemingly unrelated regression atau FGLS di atas, didapatkan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$LNGI = 0,3437 - 0,84731 * TO - 1,0027 * PMA - 0,0028 * PT + 0,0025 * POV$$

Dari hasil uji SUR yang telah dilakukan, faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang telah dilakukan analisis secara ekonomi dan pembahasan hipotesis.

Keterbukaan perdagangan memiliki p-value 0,074 yang mana lebih kecil dari 10% atau (0,10). Maka artinya menerima H_a dan menolak H_0 jadi keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Keterbukaan perdagangan memiliki koefisien sebesar -0,8473 yang mana apabila keterbukaan perdagangan naik 1% maka ketimpangan akan turun sebesar 0,8473% dan sebaliknya. Jadi tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penanaman modal asing dengan nilai probabilitas 0,0000 yang mana lebih kecil dari 10% atau (0,10). Maka artinya menerima H_a dan menolak H_0 jadi PMA memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penanaman modal asing memiliki koefisien sebesar -1,0027 yang mana apabila PMA naik 1% maka ketimpangan akan turun sebesar 1,0027% dan sebaliknya. Jadi tingkat PMA berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengangguran terbuka dengan nilai probabilitas 0,0000 yang mana lebih kecil dari 10% atau (0,10). Maka artinya menerima H_a dan menolak H_0 jadi pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan. Pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar -0,0028 yang mana apabila penanaman modal asing naik 1% maka ketimpangan akan turun sebesar 0,0028% dan sebaliknya. Jadi tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,0000 yang mana lebih kecil dari 10% atau (0,10). Maka artinya menerima H_a dan menolak H_0 jadi kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan. Pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar 0,0025 yang mana apabila penanaman modal asing naik 1% maka ketimpangan akan turun sebesar 0,0025% dan sebaliknya. Jadi tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

a. Analisis Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Keterbukaan perdagangan melalui pengujian SUR memiliki hubungan negatif dan signifikan. Ini sesuai dengan teori dan hipotesis. Selain itu juga sejalan dengan penelitian (Kuntoro & Widyastutik, 2020); (Daumal, 2013); (Krugman & Livas Elizondo, 1996) . Jika perdagangan terjadi maka akan menyamakan harga faktor-faktor produksi (upah dan sewa) yang dibayarkan untuk memproduksi barang di kedua negara. Jika harga di pasar internasional lebih tinggi dari harga domestik maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah. Jika pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, upah keseimbangan untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi akan turun dan untuk tenaga kerja berketerampilan rendah akan naik. Dari pergeseran upah antara pekerja berpenghasilan rendah dan tinggi ini, Stolper-Samuelson memberikan penjelasan mengenai dampak peningkatan keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika suatu negara dengan tenaga kerja berketerampilan rendah yang melimpah (negara berkembang) meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, maka akan terjadi penurunan upah tenaga kerja berketerampilan tinggi. Upah untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi dan peningkatan upah untuk tenaga kerja berketerampilan rendah, sehingga akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Keterbukaan perdagangan akan mengurangi ketimpangan regional dengan mengalihkan kegiatan industri dari pusat kota ke daerah pinggiran.

b. Analisis Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan

Melalui pengujian SUR, penanaman modal asing memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Ini sesuai dengan teori dan hipotesis dan sejalan dengan (Wairooy & Haryono, 2023); (Rezk

et al., 2022); (Oksamulya & Anis, 2020); (Meyer & Jensen, 2005); (Afandi et al., 2017). Penanaman modal asing telah terbukti mengurangi ketimpangan pendapatan karena investasi untuk membeli barang meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas produksi dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional, karena daerah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi karena peningkatan investasi. Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan karena hal ini berarti lebih banyak modal yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang menghasilkan distribusi pendapatan per kapita yang lebih merata. Investasi juga menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan karena meningkatkan upah pekerja tidak terampil sekaligus mengurangi tingkat aktivitas mereka, sehingga penurunan ketimpangan pendapatan bertepatan dengan peningkatan PMA di negara-negara berkembang.

c. Analisis Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Melalui uji SUR, didapatkan hasil bahwa pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis. Akan tetapi sejalan dan sesuai dengan penelitian (Reza, 2018); (Awaludin et al., 2019); (Rizqullah, 2021). Di Indonesia bagian timur, sektor informal masih lebih unggul dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor formal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih langka di beberapa provinsi. Pekerjaan formal umumnya memiliki masa depan yang lebih stabil. Di sisi lain, pekerjaan informal identik dengan upah yang rendah dan kurangnya perlindungan tenaga kerja. Namun, karena minimnya lapangan kerja formal, pekerjaan informal terus berkembang. Oleh karena itu, tenaga kerja informal lebih dominan dibandingkan dengan tenaga kerja formal. Tingginya tingkat pengangguran berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan ekonomi. Selain itu, semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin rendah angka kemiskinan karena masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Menurut Bank Dunia (2016), sebagian besar angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Situasi ini menciptakan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata, tetapi distribusi yang tidak merata ini terkonsentrasi di lapisan ekonomi yang lebih rendah. Dengan adanya hal tersebut, dari sisi pemerataan ekonomi di masyarakat, pengangguran yang tinggi berdampak pada penurunan kesenjangan ekonomi, namun dari sisi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan Indonesia.

d. Analisis Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil pengujian SUR kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Ini sesuai dengan teori dan hipotesis, dan sejalan dengan penelitian (Hindun et al., 2019); (Arafah & Khoirudin, 2022); (Kunenengan et al., 2023). Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut (Suripto & Istanti, 2006) masalah pengentasan kemiskinan adalah tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi makro, tetapi juga aspek ekonomi mikro. Kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan yang rendah berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum terpenuhi karena adanya peningkatan pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kesenjangan pendapatan akan menyempit sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, seperti memberikan pelatihan kejuruan secara gratis dengan harapan dapat berwirausaha, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Ketika tingkat kemiskinan meningkat, pendapatan masyarakat miskin menurun, yang berarti semakin banyak orang yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi semakin lebar. Peningkatan kemiskinan menghambat upaya masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi terbatas. Kondisi ini membuat mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan dalam jangka waktu yang lama. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diatasi di Indonesia. Perbedaan

dalam hal pembangunan menentukan variasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti sosial, politik, budaya, dan geografis (Wiranatakusuma & Primambudi, 2021)

KESIMPULAN

Ketimpangan pendapatan adalah masalah dan isu yang sulit untuk dipecahkan oleh suatu negara. Hal ini harus menjadi prioritas untuk segera dicarikan solusinya. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat di Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan tidak ada kecemburuan sosial yang akan menimbulkan konflik. Ketimpangan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tetapi juga dari sisi sosial dan infrastruktur. Ketimpangan yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada upah rata-rata tetapi juga pada infrastruktur, pelayanan publik, aksesibilitas, dan sarana prasarana. Ketimpangan antar provinsi di Indonesia, khususnya 17 provinsi yang peneliti pilih, terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk diatasi.

Keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan dan berpebgaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Maka ketika keterbukaan perdagangan meningkat maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Penanaman modal asing berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika penanaman modal asing mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan turun. Pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh negatif. Jadi ketika pengangguran terbuka meningkat maka ketimpangan pendapatan akan menurun. Kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Yang mana ketika kemiskinan mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Rantung, V. P., & Marshdeh, H. (2017). Determinant Of Income Inequality in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 159–171. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art5>
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628–636.
- Arsyad, & Azhar. (2017). *Media Pembelajaran*. Rajagrafindo Persada.
- Awaludin, D., Sasana, H., & Prakoso, J. A. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Oengangguran terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 14–35.
- Daumal, M. (2013). The Impact of Trade Openness on Regional Inequality: The Cases of India and Brazil. *International Trade Journal*, 27(3), 243–280. <https://doi.org/10.1080/08853908.2013.796839>
- Dorn, F., Fuest, C., & Potrafke, N. (2022). Trade Openness and Income Inequality: New Empirical Evidence. *Economic Inquiry*, 60(1), 202–223. <https://doi.org/10.1111/ecin.13018>
- Efriza, D. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(5).
- Fatsabit, M. I., & Yusran, H. L. (2019). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 71–84. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5304>
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250–265.
- Krugman, P., & Livas Elizondo, R. (1996). Trade Policy and The Third World Metropolis. *Journal of Development Economics*, 49(1), 137–150. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(95\)00055-0](https://doi.org/10.1016/0304-3878(95)00055-0)
- Kuncoro, & Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan* (3rd ed.). UPP AMP YKPN.

- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten / Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Kuntoro, E., & Widyastutik, L. A. (2020). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi dan Transformasi Struktural Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Proceeding SENDIU*, 545–552.
- Kurniawan, M. L. A., & A'yun, I. Q. (2022). Dynamic Analysis On Export, FDI and Growth in Indonesia: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 350. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2717>
- Lipsey, R., Osteiner, P., & O Porvis, D. (1992). *Pengantar Makroekonomi*. Erlangga.
- Meyer, K. E., & Jensen, C. (2005). Foreign Direct Investment and Government Policy in Central and Eastern Europe. *International Business and Government Relations in the 21st Century*, 22(2(603)), 23–42. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511488597.006>
- Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i2.12637>
- Pi, J., & Zhang, P. (2018). Skill-biased Technological Change and Wage Inequality in Urban China. *International Economic Review*, 59(4), 1691–1721. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/iere.12314>
- Ramadhona, F., Lubis, A., Azizah, N., & Zakiyyah, A. (2022). Analysis of Factors Affecting Regional Original Revenue In Nusa Tenggara Timur (2015–2020). *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17(2), 108–118. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2022.17.2.2970>
- Reza, D. (2018). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011–2016)u. *Jurnal Ilmiah*, 1–10.
- Rezk, H., Amer, G., Fathi, N., & Sun, S. (2022). The Impact of FDI On Income Inequality in Egypt. *Economic Change and Restructuring*, 55(3), 2011–2030. <https://doi.org/10.1007/s10644-021-09375-z>
- Rizqullah, A. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 1–11.
- Subanti, S., Hakim, A. R., Riani, A. L., Hakim, I. M., & Nasir, M. S. (2019). Exchange rate volatility and exports: A panel data analysis for 5 ASEAN countries. *Journal of Physics: Conference Series*, 1217(1), 6–12. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1217/1/012089>
- Suripto, & Istanti. (2006). Characteristic Of Demography, Economic Factors, and Poverty In Gunung Kidul Regency. *Economic Journal of Emerging Market*, 1(1), 37–45.
- Todaro, M. ., & Smith, S. . (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Erlangga.
- Ukperere, W. I., & Slabbert, A. D. (2009). A Relationship Between Current Globalisation, Unemployment, Inequality and Poverty. *International Journal of Social Economics*, 36(1/2), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03068290910921204>
- Wairooy, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment , Inflasi , Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Corruption Perception Index Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–50.
- Wiranatakusuma, D. B., & Primambudi, G. (2021). Determinants of Poverty in Indonesia. *EKO-REGIONAL: JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH*, 11(2), 243–267. <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.243-267>